

**EFEKTIVITAS TERHADAP PENGUTIPAN PAJAK PARKIR DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI
KOTA MEDAN MENURUT PERDA KOTA MEDAN NO. 10 TAHUN 2011**

Fitri Handryani

Muhammad Abduh, Faisal Akbar Nasution, Pendastaren Tarigan

E-mail: vie3_87@yahoo.com

ABSTRACT

In collecting the parking tax in Medan particularly always contribute to local administration income of Medan, and in field it shall depend on how effectiveness to collect it. This study is aimed to deal with the matters regarding the methods, effectiveness and the barriers found in collecting the parking tax and how its contribution to improve more city income of Medan administration. The result of this research that through the planning stages (data collection), execution (deposit) and supervision, which also embraced self assessment system. Furthermore, local income tax is less effective than the parking sector because the number of parking tax-acquired very rarely reach the target. Bottleneck that occurs in sources of income is the presence of a target area that has been designated parking tax is not comparable to the true potential, the presence of an imbalance between the actual potential possessed by the parking tax revenue and local revenue realization that has been done, so the government is making efforts to regulations areas in which sanctions with the aim of supervision.

Keywords : Parking tax, City Administration income.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) terkait dengan peran legislatif daerah dalam hal ini adalah pada tingkat kebijakan dimana dewan harus menentukan unsur kelayakan dan kemudahan jenis pungutan serta dapat menjamin keadilan baik secara vertikal maupun horizontal. Disamping itu dewan juga dapat berpartisipasi dalam bentuk pengawasan. Bila dewan benar-benar mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam kebijakan dan pengawasan, maka optimalisasi PAD akan benar-benar terwujud.

Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air tanah, parkir,

sarang burung wallet, dan pajak reklame. Berdasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota.

Salah satu sumber pajak daerah yang cukup berkembang adalah pajak parkir. Objek Pajak parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan tempat khusus parkir oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penit9pan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.¹

Pajak parkir diharapkan dapat dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.²

Beberapa tempat bisnis menggunakan lahan parkir sebagai bagian dari pelayanan kepada konsumennya. Pusat-pusat perbelanjaan yang berkembang saat ini haruslah menjamin keamanan dan kenyamanan bagi konsumen parkir adalah salah satu yang menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan dengan menggunakan kendaraan pribadi pastilah memerlukan tempat untuk menitipkan kendaraan mereka.

Berdasarkan kondisi di atas, maka pendapatan daerah tergantung kepada pajak yang dipungutnya, termasuk pajak parkir. Untuk itu dilakukan penelitian dengan judul: "Efektivitas Terhadap Pengutipan Pajak Parkir Dalam Hubungannya Dengan Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kota Medan Menurut Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2011".

B. Permasalahan

- a. Bagaimanakah metode pemungutan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kota Medan?
- b. Bagaimanakah efektivitas pemungutan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kota Medan?
- c. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pemungutan pajak parkir di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji metode pemungutan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kota Medan.
- b. Untuk mengkaji efektivitas pemungutan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kota Medan
- c. Untuk mengkaji dan meneliti hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pemungutan pajak parkir di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis
 - 1) Sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang tentang efektivitas pemungutan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan daerah.

¹ Lihat Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan No. 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan.

² Badruzzaman. "Pengelolaan Retribusi Parkir, Kacau". <http://badruznucultural.wordpress.com/2009/09/22/pengelolaan-retribusi-parkir-kacau/>, diakses tanggal 08 Februari 2013.

- 2) Sebagai bahan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam penyempurnaan peraturan Perundangan-undangan tentang pengaturan pemungutan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan daerah.
- b. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung terutama pemungutan pajak parkir terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya di Kota Medan.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki atau apabila pihak lain itu mematuhi hukum.³ Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.⁴ Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum adalah sebagai berikut:⁵

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogianya aturannya bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitor*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang memungkinkan karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik adalah mustahil untuk efektif karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancam sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai 'sihir' atau 'tenung' adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.

³ Soerjono Soekanto. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. (Jakarta: Remadja Karya CV.1985), hal. 1.

⁴ Bambang P. S. Brodjonegoro, *Menciptakan Perekonomian Daerah yang Kompetitif*, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/01/FokusTahun_2548637.htm, diakses tanggal 12 Februari 2013.

⁵ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2012), hal. 376.

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat-istiadat atau kebiasaan dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain akan lebih tidak efektif.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dasyat.

Efektivitas penegakan hukum membutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Menurut Syamsuddin Pasamai, persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.⁶ Masalah penegakan hukum tampaknya sangat sederhana, tetapi dalam kenyataankeadaan adalah tidak seperti itu, melainkan yang terjadi adalah bahwa penegakan hukum itumengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks.⁷

Efektifitas hukum diperlukan dalam pengutipan pajak parkir dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai wujud pembangunan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri (desentralisasi) sebagai daerah otonom. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

- 1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.⁸

⁶ Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi & Sosiologi Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*. Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009.

⁷ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Cet.II, (Yogyakarta: Genta,, 2010), hal.190.

⁸ Tim Apkasi, "Format Otda dan Dampaknya Terhadap Anggaran Pembangunan Daerah", Makalah, Disampaikan pada Seminar Nasional "Pasar Modal Sebagai Alternatif Pembiayaan dan Investasi dalam Kerangka Otonomi Daerah", Golden Ballroom Hotel Hilton, Jakarta, 2001.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Metode Pemungutan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Medan

a. Pengelolaan Pajak Parkir Oleh Pemerintah Kota Medan

Pengelolaan sebagai kaitan dari fungsi manajemen dalam kaitannya dengan pengelolaan pajak parkir yaitu menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

1) Perencanaan

Sebagai langkah awal pengelolaan pajak daerah maka kegiatan perencanaan sangat menentukan upaya pengelolaan pajak daerah. Hal ini mudah dipahami karena kegiatan tersebut akan menjadi dasar melakukan kegiatan selanjutnya. Sebagai dasar untuk melakukan kegiatan selanjutnya maka berhasil tidaknya peningkatan pajak daerah sangat tergantung pada kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan yang dimaksud adalah kegiatan menentukan besarnya target yang ingin dicapai dari pajak daerah untuk satu tahun anggaran.

2) Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan yang dimaksud adalah kegiatan mengaplikasikan target yang telah ditetapkan melalui pemungutan pajak daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut maka indikator yang digunakan adalah kegiatan penyeteroran, pembukuan dan pelaporan serta penagihan.

a) Penyeteroran

Pajak yang telah dikumpulkan selanjutnya disetor kepada bendahara DPPKAD. Bendahara inilah yang kemudian menyeteror hasil pajak daerah di kas daerah. Bendahara DPPKAD mempunyai tugas rutin yakni setiap akhir bulan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyeteroran uang untuk keperluan pemeriksaan keuangan sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh seksi pelaporan.

b) Pembukuan dan Pelaporan

Kegiatan selanjutnya setelah penyeteroran adalah pembukuan dan pelaporan. Kegiatan pelaporan merupakan pekerjaan lanjutan setelah pembukuan dan dilaksanakan setiap akhir periode bulanan, triwulan, semester, dan akhir tahun. Seksi pembukuan selaku pelaksana akan menerima formulir atau daftar sebagai dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pencatatan dari seksi penetapan. Dari hasil pencatatan tersebut akan diketahui jumlah penerimaan per jenis pajak, begitu pula jumlah tunggakan baik perjenis pajak maupun perwajib pajak.

c) Penagihan

Penagihan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak menaati peraturan, dalam hal ini belum melunasi pajak yang terutang sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam surat ketetapan. Kegiatan penagihan dibedakan atas penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dimulai dari peringatan, teguran pertama, teguran kedua sampai pada teguran ketiga, sedangkan penagihan aktif berupa proses paksa, penyitaan sampai dengan lelang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus.

3) Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pemborosan-pemborosan dan kegagalan-kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan pajak daerah dalam bidang pajak parkir di kota Medan. Berdasarkan hasil wawancara, diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir. Pengawasan pajak tersebut berguna agar diketahui omset atau pendapatan yang sesungguhnya. Setelah dilakukan pengawasan, dilakukan verifikasi untuk membantu target pajak parkir dan di dalam verifikasi itulah ada temuan-temuan kurang bayar. Misalnya, dilaporkan Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), dengan *self assesement* maka dicek apakah benar. Ternyata pajak yang wajib disetor Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah), maka selisih Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) disebut pajak kurang bayar.⁹

Bentuk pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh DPPKAD Kota Medan sebagai berikut:

a) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya baik secara preventif maupun represif.

b) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau aparat penugasan fungsional dengan mendatangi langsung objek (tempat penyelenggaraan parkir) yang diawasi baik pada waktu kegiatan yang sedang berlangsung maupun sesudah kegiatan dilaksanakan.

b. Pengelolaan Pajak Parkir Melalui Perjanjian

Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, walaupun demikian dimungkinkan antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman suratnya kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Terhadap pengelolaan perparkiran, biasanya kontrak pengelolaan perparkiran dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Diawali dengan kontrak penawaran yang dilakukan oleh perusahaan pengelola, misalnya dengan konsep sebagai berikut: Konsep kerja sama yang dilakukan dengan pemilik properti/ Gedung adalah dengan sistem kemitraan. Oleh karena itu, dapat diberikan sejumlah nilai tambah dan pendapatan yang maksimum dari hasil pengelolaan parkir ini kepada suatu gedung/ perkantoran, pusat perbelanjaan, atau hotel.

Berdasarkan hasil wawancara, sesungguhnya tidak ada peraturan khusus mengenai pendapatan yang akan didapat pengelola parkir. Pada umumnya perjanjian dibuat dalam sebuah surat perjanjian dengan materi si pengelola parkir akan memberikan setoran secara berkala kepada Pemerintah.¹⁰

Pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area properti, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian besar pengelola parkir mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir. Pengelola parkir ini dibayar atas dasar jumlah transaksi yang dilakukan ataupun berdasarkan persentase pendapatan (*fee*).

Pengelolaan yang tidak efisien mengakibatkan pengelolaan pada akhirnya mulai diarahkan pada kerjasama dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini diberbagai lokasi parkir umum. Perusahaan biasanya menggunakan alat bantu pencatatan dan perhitungan biaya yang dikelola dengan bantuan komputer basis data,

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutan Partahi, Kepala Bagian Pajak Dinas Pendapatan Kota Medan, tanggal 19 April 2013.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sutan Partahi, Kepala Bagian Pajak Dinas Pendapatan Kota Medan, tanggal 19 April 2013.

sehingga kekeliruan pencatatan dapat dihilangkan serta mempersulit pencurian kendaraan, dan bila memungkinkan menerapkan asuransi bagi kendaraan yang diparkir.

Bentuk perjanjian pengelolaan retribusi parkir antara Pemerintah kota (Pemko) Medan dengan pengelola dilakukan secara tertulis dan biasanya dalam bentuk kontrak baku (standard kontrak). Pengelolaan Perparkiran di Kota Medan dalam perjalanannya, melalui tahapan-tahapan pengelolaan yang panjang, di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Medan.

B. Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Di Kota Medan

Salah satu kriteria penting bagi pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah bersangkutan dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Namun masalahnya bukan hanya berupa jumlah yang tersedia, tapi juga sampai seberapa jauh jumlah kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya yang ada di daerah.

Suatu pemerintah daerah dianggap berhasil apabila bisa memberikan layanan publik yang memadai dan memperbaiki kesejahteraan. Artinya, Pemda dituntut mampu melakukan alokasi pengeluaran APBD yang efisien dan efektif tanpa kebocoran, menggerakkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan akhirnya memperbaiki pendapatan masyarakat lokal. Untuk mencapai tujuan ideal tersebut, pemda mau tidak mau harus mengedepankan upaya menumbuhkan investasi di daerahnya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Investor potensial dapat berasal dari pengusaha daerah itu sendiri maupun pengusaha luar daerah, bahkan pengusaha luar negeri.¹¹

Terkait dengan efektivitas/implementasi pemungutan pajak daerah, perlu dilihat dari pengelolaan berdasarkan kawasannya seperti berikut ini:

a. Pengelolaan Dalam Kawasan

Parkir dalam Kawasan merupakan lokasi parkir yang berbeda dalam areal pasar, dimana untuk masuk ke pasar dibangun pos-pos parkir. Pengelolaan parkir dalam kawasan dapat dibedakan dalam dua bentuk; (a) tidak punya lokasi khusus parkir tetapi lokasi yang tersebar dalam areal kawasan; dan (b) lokasi tertentu dalam kawasan yang dibangun khusus untuk lokasi parkir.

Dalam implementasinya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah, khususnya dinas parkir kota adalah:

- (a) Lokasi parkir pada setiap tempat harus jelas sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat baik konsumen maupun produsen atau penjual;
- (b) tidak adanya pemungutan ganda dan
- (c) Tanggung jawab petugas harus lebih ditingkatkan.

Bentuk kedua pengelolaan parkir dalam kawasan adalah dengan membangun areal parkir khusus yang berada dalam kawasan parkir di pasar. Hal ini didasari oleh beberapa pemikiran berikut:

- 1) Pada lokasi tertentu keamanan kendaraan lebih terjamin, karena petugas lebih dapat mengontrol kendaraan baik yang masuk dan yang akan keluar dengan bukti-bukti yang ada.
- 2) Lokasi tertentu akan membuat kendaraan yang terparkir menjadi tertib, karena telah ada suatu lokasi yang khusus, dimana semua kendaraan yang terparkir di sana dengan teratur dan tidak memakai badan jalan lagi.

¹¹ Ateng Syarifuddin, *Butir-butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 23.

- 3) Kecil kemungkinan pemilik kendaraan yang melewati pos tidak membayar retribusi, sehingga secara otomatis akan dapat meningkatkan penerimaan melalui retribusi parkir.

Untuk areal parkir khusus dalam kawasan, pengelolaan parkir sebaiknya dilakukan oleh pihak swasta. Dalam model ini, operasional diserahkan kepada pihak swasta. Dinas parkir hanya membuat aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan. Sistem yang dikembangkan adalah bagi hasil. Semakin besar penerimaan akan semakin besar penerimaan retribusi parkir.

b. Pengelolaan Parkir Luar Kawasan

Parkir luar kawasan yang merupakan parkir yang paling luas, hal ini dikarenakan parkir luar kawasan merupakan wilayah yang tersebar. Pada parkir luar kawasan ini pengelolaan yang tepat dilakukan oleh pihak swasta karena dengan luas areal parkir yang tersebar memerlukan banyak sekali tenaga kerja dan pemerintah sangat sulit untuk mengawasi.

c. Pengelolaan Parkir pada Areal Khusus

Areal khusus di sini dimaksudkan areal yang dimiliki oleh pihak swasta. Sebaiknya pengelolaan pada areal seperti ini diserahkan kepada pihak swasta sebagai pemilik areal parkir tersebut. Sistem yang diterapkan adalah bagi hasil yang berbasis kepada potensi parkir.

Persoalan efektivitas hukum seperti yang diungkapkan Syamsuddin Pasamai, dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum, persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis.

Kurang efektifnya pendapatan daerah dari sektor pajak parkir karena jumlah yang didapat pajak parkir sangat jarang mencapai target. Bahkan sejak tahun 2006, pajak parkir belum pernah mencapai target.¹² Hal ini berakibat pajak parkir tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan daerah.

C. Hambatan-Hambatan yang Ditemui dalam Upaya Pemungutan Pajak Parkir di Kota Medan

Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan sumber pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan mengalami hambatan khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir, adapun hambatan yang dihadapi adalah:¹³

1. Terdapatnya target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya
2. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir maupun realisasi pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan.
3. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak parkir.

Pelaksanaan pemungutan pajak parkir, masih memiliki kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi kantor pajak Medan adalah:¹⁴

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Sutan Partahi, Kepala Bagian Pajak Dinas Pendapatan Kota Medan, tanggal 19 April 2013.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Sutan Partahi, Kepala Bagian Pajak Dinas Pendapatan Kota Medan, tanggal 19 April 2013.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sutan Partahi, Kepala Bagian Pajak Dinas Pendapatan Kota Medan, tanggal 19 April 2013.

1. Keterlambatan menerima SPP
2. Lemahnya sikap aparatatur pajak
3. Kurangnya sosialisasi
4. Sanksi hukum yang lemah
5. Kurangnya kesadaran masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, beliau mengatakan bahwa: Pelaksanaan pendataan ulang/uji pelik tiap tahunnya sangat menghambat kerja dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah karena selain kualitas pegawai yang kurang memadai juga adanya aset-aset daerah yang harus dikelola setiap waktunya, sehingga pendataan ulang akan memakan waktu jika dilakukan setiap tahunnya. Dengan ini Pemerintah Daerah harus melakukan upaya yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak parkir pada Pemerintah Kota Medan. Adapun langkah-langkahnya yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang realistis sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi.
- 2) Membuat peraturan daerah yang di dalamnya menetapkan sanksi apabila parkir di sembarang pinggir badan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir.
- 3) Memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan pajak parkir dan pendapatan asli daerah dengan cara :
 - a) Mengidentifikasi pembayar pajak yang baru maupun jumlah pembayar yang telah ada.
 - b) Memperbaiki basis data objek dan subjek pajak, melalui pemutahiran data lapangan.
 - c) Memperbaiki penilaian dengan melakukan pemeriksaan lapangan/kantor terhadap wajib pajak.
 - d) Menghitung kapasitas penerimaan, untuk menentukan target pajak yang realistis.

Dengan upaya tersebut terbukti dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada bahkan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut karena penerimaan pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sehingga penerimaan pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan optimal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode pemungutan pajak parkir terhadap pendapatan daerah di kota Medan yaitu melalui tahapan perencanaan (pendataan), pelaksanaan (penyetoran) dan pengawasan, yang didalamnya dianut *self assessment system* yang membebaskan warga untuk menghitung sendiri tanggungan pajaknya, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dimana Setiap wajib pajak melaporkan/menyampaikan pajaknya setelah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada walikota yang selanjutnya diawasi penyetorannya oleh aparat pemungut pajak/fiskus.
- b. Penerimaan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD dapat dikatakan kurang efektif. Kurang efektifnya pendapatan daerah dari sektor pajak parkir karena jumlah yang didapat pajak parkir sangat jarang mencapai target. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam pengutipan dan

pengelolaan pajak parkir terlebih dalam penyetoran pajak parker oleh wajib pajak.

- c. Hambatan yang ditemui seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga berpengaruh terhadap target yang ditetapkan, sanksi hukum yang lemah terlebih pada penyelenggaraan parkir di pinggir jalan serta lemahnya sikap aparat pajak. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut yaitu memeriksa kembali antara target pajak parkir dan potensi yang ada, menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang realistis sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi, memperluas penerimaan pajak dan membuat peraturan daerah dengan menetapkan sanksi dalam meningkatkan pengawasan.

B. Saran

- a. Hendaknya pengelola parkir dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga bisa mencapai target dalam penerimaan pajak dari sektor parkir.
- b. Karena pengelola biasanya tidak efisien sehingga pengelolaan parkir dilaksanakan melalui kerjasama dengan perusahaan swasta, seperti yang banyak ditemukan saat ini. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan hukum wanprestasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan perparkiran ini secara khusus.
- c. Untuk memaksimalkan pemungutan pajak parkir di kota Medan diperlukan ketegasan melalui sosialisasi dan penegakan peraturan daerah yang mengatur Pajak Parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2012.

Pasamai, Syamsuddin, *Sosiologi & Sosiologi Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*. Makassar, Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009.

Rahardjo,Satjipto. *Sosilogi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Cet.II, Yogyakarta: Genta. 2010.

Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. (Jakarta: Remadja Karya CV.1985.

Syarifuddin, Ateng. *Butir-butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya, Bandung, 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Perda Kota Medan No. 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan.

Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

Sumber Lain

Badruzzaman. Pengelolaan Retribusi Parkir, Kacau. <http://badruznucultural.wordpress.com/2009/09/22/pengelolaan-retribusi-parkir-kacau/>, diakses tanggal 08 Februari 2013.

Brodjonegoro, Bambang P. S. *Menciptakan Perekonomian Daerah yang Kompetitif*, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/01/FokusTahun_2548637.htm, diakses tanggal 12 Februari 2013.

<http://katahatiku2012.blogspot.com/2013/03/definisi-pajak.html>, diakses tanggal 27 Agustus 2013